

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. (2013). *ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNG BALAI*. 390–413.
- Ahmad, M. J. (2025). *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem*.
- Aituarauw, I. F. A. (2021). *Efektifitas Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar*. 1(2), 99–110.
- Amerieska, S., Setiati, F., & Mulyono, I. (n.d.). *Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)*. 12(2).
- Aulia, F. Z. (2019). *Peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Coryanata, I. (2012). *AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARANDAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH*. 12(2), 110–125.
- DPRD, S. (2022). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–123.
- Febriana, E. N., Indrayati, R., & Jayus. (2017). *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah*. 4(2), 131–149.
- Gischa, S. (2023). *Pengertian Prosedur Menurut Para Ahli*. Kompas.Com Skola. https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/02/140000769/pengertian-prosedur-menurut-ahli#google_vignette
- Haq, M. F. (2017). *ANALISIS STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH*. 1(1), 26–41. <https://www.kbbi.web.id/kelola>
- Ibrahim. (2014). *Perencanaan Penganggaran Daerah*. 15(32), 98–111.
- Ismail, T. (2005). *Keuangan Daerah*. 1–51.
- Jacob, J., Husen, A., & Permatasari, D. (2024). *BUKU AJAR : PENGELOLAAN KEUANGAN*.
- Kariaman, S. (2017). *PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM MEWUJUDKAN PEKERJAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN PADA BIDANG KEPEMUDAAN DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA UTARA*. 2.

- Kementerian dalam negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. 547.
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Kurniawan, A. E. S., Rahayu, D. P., & Supheni, I. (2024). *Dampak Penerapan Aplikasi SIMASET Pengelolaan BMD Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. 4(1), 74–87.
- Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). *ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD) PROVINSI ACEH*. 4(2), 215–236.
- Lakoro, F. S., & Sukrianto. (2022). *Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Boalemo*. 1(3), 253–263. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.253>
- Maulidiah, S. (2017). *SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI DI DAERAH*. III(April), 233–242.
- Meida, S., & Lawita, N. F. (2023). *Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Kas Kecil*. 2(2), 56–65.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.27 (Revisi 1998) Akuntansi Perkoperasian, Jakarta*.
- Nasution, D. A. D. (2018). *ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH*. 2.
- Naway, F. A. (2016). *Strategi pengelolaan pembelajaran*.
- Oktaviranti, M., Rengga, A., & Aek, K. R. (2026). *Penghapusan Kendaraan Dinas Rusak sebagai Solusi Mengurangi Biaya Pemeliharaan untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan BMD Pada Kantor BPKAD Kabupaten Sikka*. 13(1), 581–591.
- Palupi, N. A. (2012). *Accounting Analysis Journal*. 1(2).
- Pareda, M., Sondakh, J. J., & Ilat, V. (2015). *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. 268–279.

- Pemerintah pusat. (2003). *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Pemerintah pusat. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah pusat. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah pusat. (2020). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 040501*.
- Piri, T. O. (2007). *Analisis efektivitas pengelolaan barang milik daerah di kantor pelayanan perizinan terpadu provinsi sulawesi utara*. 4(1), 1008–1019.
- Priana, W. (2023). *Keuangan Daerah*.
- Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2004). *PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , Kabupaten Lamongan)*. 3(1), 111–117.
- Raharjo, M. M. (2022). *Sistem Dan Administrasi Pemerintah Daerah Teori, Regulasi, Implementasi* (Y. S. Hayati (ed.)).
- Rinta, A. S., Febriana, D., & Wulandari, R. (2022). *STRATEGI PENGELOLAAN PEMASARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*. 198–205.
- Sabili, E. H., & Sunaningsih, S. N. (2020). *Peran BPKAD Dalam Penyajian Data Keuangan Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel*. 16(6), 2083–2093.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2012). *DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. 2(32), 236–242.
- Sitompul, A. (2014). *Jurnal Pemerintahan Integratif*. 2, 1.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*.
- Suanda, D., & Yudi, R. (2022). *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). *Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa*. 1(2), 1–10.
- Suparji. (2019). *Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia*. IV(1), 1–5.
- Syahputra, K., Syaikat, Y., & Irwanto, A. K. (2018). *STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH*. 10, 1–14.

- Telly, S. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(4), 567–588. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4>
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2.
- Wartuny, S. (2020). *Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya*. 1(November), 22–33.
- Wijaya, D. &, & Irawan, R. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat*. XVI(1).
- Yadisar, A. M. (2017). *Manajemen pengelolaan aset daerah*.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia*.
- Yuniarsih, Y. (2019). *Mekanisme Pelaporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Subang*. 1(1), 66–84.

